

# PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG MEDAN MELALUI PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SYARIAH KEMBANG SETANJUNG

**Anton Budi Pranata<sup>1</sup>, Makmur<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pasir Pangaraian

[antonbudipranata@gmail.com](mailto:antonbudipranata@gmail.com)

DOI: [10.30606/3ff28p80](https://doi.org/10.30606/3ff28p80)

**ABSTRACT** The empowerment of BUMDes aims to optimize village development potential participatively to improve community welfare. This study examines the impact of BUMDes Syariah Kembang Setanjung on the economy of Tanjung Medan Village using a descriptive qualitative method. Data was collected through interviews, observations, and literature studies. The results show that the community still needs encouragement for self-development. BUMDes can be managed based on Good Corporate Governance principles, focusing on education, training, and entrepreneurship. The BUMDes management is committed to implementing sustainable programs to enhance the welfare of the village community.

**Keywords:** Welfare, Community, Sharia BumDes, Kembang Setanjung

**ABSTRAK** Pemberdayaan BUMDes bertujuan mengoptimalkan potensi pembangunan desa secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pengaruh BUMDes Syariah Kembang Setanjung terhadap ekonomi Desa Tanjung Medan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan dorongan dalam pengembangan diri. BUMDes dapat dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance, serta berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan. Pengelola BUMDes berkomitmen menjalankan program berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata-kata Kunci:** Kesejahteraan, Masyarakat, BumDes Syariah, Kembang Setanjung

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama salah satunya adalah BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) (Fitria, 2020). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (1) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMdes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Siswanto, Dewi, Maryanto, & Brahmono, 2023).

Program otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan penerimaan desa dalam rangka pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Effendi, Rambe, Ritonga, & Sitio, 2022). Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya serta melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Aemanah & Priyono, 2022).

Dalam pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Medan bahwa faktor geografi Desa Tanjung Medan tersebut sebagian besar lahan pertanian yang cukup subur terutama kelapa sawit. Hasil panen tanaman kelapa sawit relative cukup besar hasilnya. Potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar dan faktor geografis yang menguntungkan dengan tumbuh suburnya hasil pertanian dan perkebunan, Desa Tanjung Medan memliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) untuk mengelola usaha potensi Desa yang ada., Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang mendorong kemandirian suatu Desa. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk

memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan (Hasanah, 2019). Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di Desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan (Chikmawati, 2019). Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi Desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi Desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan Mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi (Hasanah, 2019).

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes pada umumnya, yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian desa, 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Sebagai lembaga komersial BUMDes harus bisa mengolah potensi desa yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan pedesaan, sehingga dapat menciptakan daya alam yang belum dikelola. Selain itu, dapat memperbaiki fasilitas penunjang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradani, 2020).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020). Sedangkan konsep pendirian BUMDes dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa (Adawiyah, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembentukan BUMDes mencakup pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia jaminan sosial, dan penyedia layanan bagi masyarakat desa (Syahra, 2013).

Pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa, sampai saat ini tidak diagendakan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah (Hailudin, 2021). Padahal pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai

proses memandirikan masyarakat yang pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan taraf kesejahteraan. Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamiskan segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya (Sanjaya, Hartati, & Premayani, 2020).

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, yaitu sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Siswanto et al., 2023).

Pemberdayaan BUMDes dalam hal ini mencakup proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber "dari, oleh, dan untuk masyarakat" atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif (Kurniawan, 2021). Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal (Febryani et al., 2018).

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1) Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 3) Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan (Hasanah, 2019).

Motivasi pendirian BUMDes karena semata mengharapkan dana desa tanpa membangun sebuah mekanisme yang baik dan menjamin perputaran modal yang menguntungkan akan berpotensi menimbulkan ketergantungan baru masyarakat Desa kepada pemerintah atau bertolak belakang dengan ide awal untuk meningkatkan kemandirian Desa. Resiko lainnya adalah munculnya penyelewengan dan penyusutan dana Desa yang akan menimbulkan konflik sosial serta permasalahan hukum di kemudian hari. Begitu pula BUMDes di Desa Tanjung

Medan masih belum berkembang dengan baik, BUMDes dikelola oleh orang tertentu, dimana sebagian besar masyarakat kurang mengetahui aktifitas operasional usahanya, kadang beberapa orang masyarakat Desa berkonflik secara ekonomi dengan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan bahwasanya perekonomian masyarakat mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini ditandai, banyaknya bermunculan pelaku usaha baru masyarakat seperti Pabrik tahu, pabrik tempe, kedai sembako dan lain-lain yang mana dari usaha-usaha masyarakat tersebut berkat unit usaha simpan pinjam BuMDeS Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Syariah Kembang Setanjung?.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan pengelola BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan website resmi terkait. Adapun teknik analisis data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan profil tingkat pendidikan dimana sebagian besar penduduknya berpendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, sedangkan yang berpendidikan tinggi atau perguruan tinggi relative kecil jumlahnya, sehingga pemahaman akan suatu kelembagaan/organisasi yang bermanfaat untuk mereka masih kurang, Sehingga keberadaan BUMDes di daerah mereka masih diabaikan, merka berpikir BUMDes tersebut hanya milik perorangan yang menguntungkan orang pribadi saja bukan untuk masyarakat. Sedangkan aparaturnya pemerintahan dan kelembagaan beberapa orang memiliki pendidikan tinggi, sehingga dapat diasumsikan mumpuni dalam mengelola organisasi karena telah memperoleh pendidikan tinggi.

Masyarakat mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun desanya termasuk masih mau menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum, untuk membangun jalan, mesjid, posyandu dan lainnya, semangat gotong royong masih tinggi, kepedulian untuk iuran/sumbangan masih tinggi, tersedia tenaga teknis

(tukang kayu, tukang jahit, tukang tembok), tersedia Tokoh Agama, Ulama, Ustadz, Guru ngaji, Guru pendidik, Bidan, Pelaku Olah Raga. Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan organisasi masih tinggi, Tersedia lembaga-lembaga Desa seperti; Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa (MUI-Desa) Karang Taruna, Linmas, Kelompok Tani, dan Lembaga Pendidikan sampai SMP/MTs Negeri.

### **Pertama, Aspek Organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BUMDes Tanjung Medan bahwa pengelolaan BUMDes di sini belum rapi, artinya mulai dari perencanaan itu belum secara keseluruhan tertata dengan rapi, begitu juga dengan pengorganisasian yang terlihat tidak terstruktur dengan baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dari BUMDes masih belum memuat prinsip-prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Manajemen BUMDes masih system menejemen konvensional. Konsep *Good Corperate Government* (GCG), masih belum terimplementasi dengan baik terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### **Kedua, Aspek Operasional**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BUMDes Tanjung Medan bahwa BUMDes Tanjung Medan belum memiliki *standart operasional procedure* (SOP) yang baku sebagai pedoman atau acuan untuk menjalankan BUMDes. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa operasional BUMDes kurang memiliki alur yang jelas dari hilir ke hulu nya, belum terdapat suatu alur operasional yang jelas. Jenis produk yang dihasilkan masih heterogen dan bervariasi, dengan kata lain belum fokus jenis usahanya (*core product*), sehingga membuat masyarakat Desa mengalami kekurangan informasi akan kegiatan usaha BUMDes.

### **Ketiga, Aspek Pemasaran**

Hasil wawancara peneliti dengan Anggota BUMDes Tanjung Medan bahwa BUMDes belum maksimal dalam menawarkan produk-produknya secara baik mungkin banyak factor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kreativitas anggota BUMDes yang masih minim dalam hal memasarkan produk BUMDes kepada masyarakat di era digital ini. Dapat peneliti Tarik kesimpulan bahwa BUMDes masih terbatas dalam hal memasarkan produk dari BUMDes, masing terbatas akses pemasaran maupun jumlah jaringan pemasarannya, serta penggunaan teknologi yang masih konvensional sehingga jangkauannya terbatas pula. Kurangnya Kreativitas dari pengelola BUMDes untuk memanfaatkan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang dimiliki desa agar memiliki nilai tambah produk mereka. Begitu pula masih terbatas pasokan untuk produk BUMDes

dari petani, karena para petani masih enggan menjual produknya kepada BUMDes.

#### **Keempat, Aspek Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara BUMDes Tanjung Medan bahwa sejauh ini modal BUMDes dari deposito warga Desa Tanjung Medan dengan system bagi hasil. Adapun manajemen keuangan yang dikelola oleh BUMDes masih dalam katagori cukup baik. Dari keterangan tersebut dalam disimpulkan bahwa sumber keuangan BUMDes merupakan bantuan dari Desa yang relative cukup besar untuk pengelolaan BUMDes, hanya pengeloaan keuangan sumber dana dan penggunaan dana belum efektif, pencatatan keuangan belum menggunakan prinsip-prinsip dan standard akuntansi keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat juga belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan laporan keuangan badan usaha BUMDes.

Y. W. Sari (2017) yang menyimpulkan aktivitas kelembagaan BUMDes Guna adalah proses yang kompleks utamanya pada stuktur pengurus, peserta, hingga mekanisme proses administrasi. Penelitian Wichaksono Prabowo (2019) menyimpulkan kebijakan dari institusi yang mengarah pada kemandirian desa berjalan kurang baik dan membutuhkan peningkatan pendidikan bagi manajer atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa, pelatihan-pelatihan kepada anggota dan memerlukan keterlibatan aktif warga di dalam semua proses. Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk belum optimal dan mengarah pada esensi keberadaan Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya Diartho (2017) menyimpulkan pentingnya meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola bagi pengoptimalan tata kelola dengan BUMDes. Keduanya menjelaskan signifikansi pengaturan atau governansi kelembagaan bagi suksesnya BUMDes. Titik kelemahan kelembagaan BUMDes adalah proses kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik, sebagian pemerintah lokal masih kekurangan pemahaman dan ketidaksiapan juga tampak pada preferensi kegiatan usaha yang hendak dikelola. SOP dan unit usaha yang berbadan hukum hanya sebagian BUMDes memiliki hal tersebut dikarenakan akta notaris bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki BUMDes (Ridwan, 2015).

BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistimatis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah Pemerintah Kabupaten, Perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak (Eriswanto & Sudarma, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengembangan BUMDes perlu juga dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes diharapkan merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa. BUMDes diharapkan juga dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian Desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi Desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat menyerap tenaga kerja dipedesaan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) pengembangan diri individu masyarakat, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara informal tidak terstruktur yang kami lakukan, bahwa motivasi masyarakat untuk terbuka dan pengembangan diri masih memerlukan dorongan dan trigger motivasi. Hal ini terlihat dari minat belajar dan pembangunan potensi diri yang masih kurang. 2) Adapun bidang usaha kemandirian ekonomi yang bisa dikembangkan dan dikelola adalah membangun BUMDes yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Government*. Selain itu ruang lingkup yang bisa dijadikan tujuan besar ke depannya bagi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pembentukan jiwa dan karakter Kewirausahaan masyarakat. 3) Pengelola BUMDes termotivasi dan memiliki komitmen untuk mengikuti program berkelanjutan yang telah dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak Desa Tanjung Medan untuk terus menggali potensi lokal desa agar peningkatan ekonomi masyarakat merata dan membaik.
2. Kepada pengurus BUMDes Kembang Setanjung untuk terus meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia agar ke depannya lebih baik dan berkembang unit-unit usaha sehingga perekonomian masyarakat semakin membaik dan pada level sejahtera.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, R. (2018). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis aspek modal sosial (studi pada bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) (PhD Thesis). Universitas Airlangga.
- Aemanah, U., & Priyono, S. (2022). Pengaruh Manajemen BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Marga Cinta. *JECO: Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, 1 (2), 64–74.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

- Alizah, N., Ibrahim, M., & Adnan, A. A. (2021). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 7–13.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Ari Budyanto Anjas, A. (2021). Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba (PhD Thesis). Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Asis, A. (2021). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Penguatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (PhD Thesis). Universitas Hasanuddin.
- Chaerudin, A., Rani, I. H., & Alicia, V. (2020). *Sumber daya manusia: Pilar utama kegiatan operasional organisasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113.
- Effendi, M., Rambe, M. T., Ritonga, R. A., & Sifio, R. (2022). Strategi Inovasi Bumdes Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(1), 61–67. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i1.11479>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Adl Islamic Economic*, 13–28.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *QIEMA (Qomaruddin Islam., Vol. 5 No. 1, Pp. 14–45*.
- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).

Kurniawan, D. (2021). Pengelolaan BUMDes Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 5(1), 40–51.

Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.

Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75.

Siswanto, H., Dewi, D. C., Maryanto, M. A., & Brahmono, B. (2023). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Maju Bersama Di Desa Jadian Baru Kecamatan Mulak Sebingkai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 163–176.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahra, R. (2013). Eksklusi sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 1–34.